



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS-PHI/2017 TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN KEADILAN DALAM KONSEP OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

FAISAL ARIF RAHMAN, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS-PHI/2017 TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN KEADILAN DALAM KONSEP *OUTSOURCING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Intisari  
oleh

Faisal Arif Rahman<sup>1</sup> dan Susilo Andi Darma<sup>2</sup>

Nofrian merupakan pegawai PT Tiffa yang ditempatkan pada bagian *ticketing* PT Garuda Indonesia dan di PHK secara sepihak oleh PT Tiffa, akan tetapi PT Garuda yang harus menanggung pemenuhan hak-hak Nofrian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian Putusan MA 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dengan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan keadilan dalam konsep *outsourcing* sistem perburuhan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan pemenuhan hak pekerja/buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung wawancara dengan narasumber hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan hukum dengan cara studi dokumen. Data dari penelitian kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, putusan MA 1438 K/Pdt.Sus PHI/2017 belum sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga dimungkinkan untuk kedua belah pihak membuka kembali kasus ini dengan bukti-bukti baru yang ditemukan oleh peneliti, kedua, keadilan di dalam konsep *outsourcing* tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena terjadi pembatasan terhadap bidang pekerjaan yang dapat dilakukan *outsourcing* dan terjadi kesalahan penerapan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (4) sehingga merugikan salah satu pihak. Peninjauan kembali dapat dilakukan untuk memberikan putusan yang lebih adil dalam permasalahan ini.

Kata Kunci: *Outsourcing*, Keadilan, Perjanjian Kerja, Buruh, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Imogiri Timur 154 B, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, email: [justical12@gmail.com](mailto:justical12@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438 K/PDT.SUS-PHI/2017 TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN Keadilan dalam konsep outsourcing berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN

FAISAL ARIF RAHMAN, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

THE ANALYSIS OF JURIDIS DECREE SUPREME COURT NUMBER 1438 K/PDT.SUS-PHI/2017 ON WORK AGREEMENT AND JUSTICE IN THE CONCEPT OF OUTSOURCING BASED ON ACT NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT

Abstract

by

Faisal Arif Rahman<sup>3</sup> dan Susilo Andi Darma<sup>4</sup>

*Nofrian is a company employee of Tiffany who was placed in the ticketing section of the Garuda Indonesia company and was unilaterally fired by the Tiffa company, but the Garuda company must bear the fulfillment of Nofrian rights. The purpose of this study was to find out and examine the suitability of 1438 K/Pdt.Sus PHI/2017 the Supreme Court Decision with the employment agreement between workers and employers and justice in the concept of outsourcing the labor system in Indonesia based on Labor Act Number 13 of 2003 related to compliance workers' rights when there is a termination of employment.*

*This research is a normative study supported by interviews with speakers of the Industrial Relations Court judges. The research was conducted through library research on various legal materials by means of document studies. Data from library research and interviews were analyzed qualitatively, the results of the analysis were presented descriptively.*

*The results of the study show that, first, the decision of the MA 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017 is not in accordance with Article 57 paragraph (2) and Article 66 paragraph (4) of the Constitution of labor system in Indonesia so that it is possible for both parties to reopen this case with evidence new evidence found by researchers, second, justice in the concept of outsourcing is not in accordance with the with Constitution of labor system in Indonesia because there are restrictions on the field of work that can be outsourced and there is an error in applying Article 57 paragraph (2) and Article 66 paragraph (4) so that harm one party. A judicial review can be made to provide a fairer decision on this issue.*

Keywords: Outsourcing, Justice, Employment Agreement, Labor, Certain Time Work Agreements.

---

<sup>3</sup> Law Students of Gadjah Mada University, 154 B east Imogiri Road, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, email: [justical12@gmail.com](mailto:justical12@gmail.com)

<sup>4</sup> Lecturer of Law Faculty of Gadjah Mada university